

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**



# LAPORAN KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN BATUBARA  
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
TAHUN 2023

Jl. H. Barus Siregar Desa Tanjung Mulia Kecamatan Air Putih 21256

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LK) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 ini dapat tersusun.

Laporan Kinerja SKPD Tahun 2023 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. dan didasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan alat penilai kinerja OPD secara kuantitatif, dan wujud transparansi serta akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara menuju *good governance*.

Demikian Laporan Kinerja (LK) ini disusun, semoga dapat digunakan sebagai evaluasi untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan LK dan pencapaian keberhasilan kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 diucapkan terimakasih.

Batubara, 31 Januari 2024

**Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan  
Kabupaten Batu Bara**

**Ir. Susilistiawati Ritonga, M.Si**

NIP. 19680228 199303 2 002

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	1
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	5
2.1 RENCANA KERJA.....	5
2.2 PERJANJIAN KINERJA.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	15
3.2 REALISASI ANGGARAN.....	27
BAB IV PENUTUP.....	38
LAMPIRAN	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pembangunan pertanian berperan secara strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan, sumber pendapatan masyarakat petani dan turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara langsung dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB sendiri masih merupakan salah satu instrument pengukuran kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023.

Pembangunan pertanian di Kabupaten Batu Bara dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan seluruh stakeholder pertanian, sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk terlaksananya pembangunan pertanian sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah yang mengutamakan prinsip transparansi, akuntabel dan transparansi sebagai pilar *Good Governance*. Program-program pembangunan pertanian juga memperhatikan isu-isu strategis pertanian saat ini diantaranya; isu pewujudan ketahanan pangan, masih kurangnya infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung pertanian dan penyebarannya belum merata, daya saing produk pertanian yang masih rendah, laju konversi alih fungsi lahan pertanian yang cenderung meningkat dan belum optimalnya pemasaran produk pertanian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dilakukan pengukuran kinerja terhadap pelaksanaan program-program pembangunan tahun 2023, sebagai perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan target kinerja dan keuangan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

#### **1.2 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian

dan Perkebunan, serta Tugas Pembantuan.

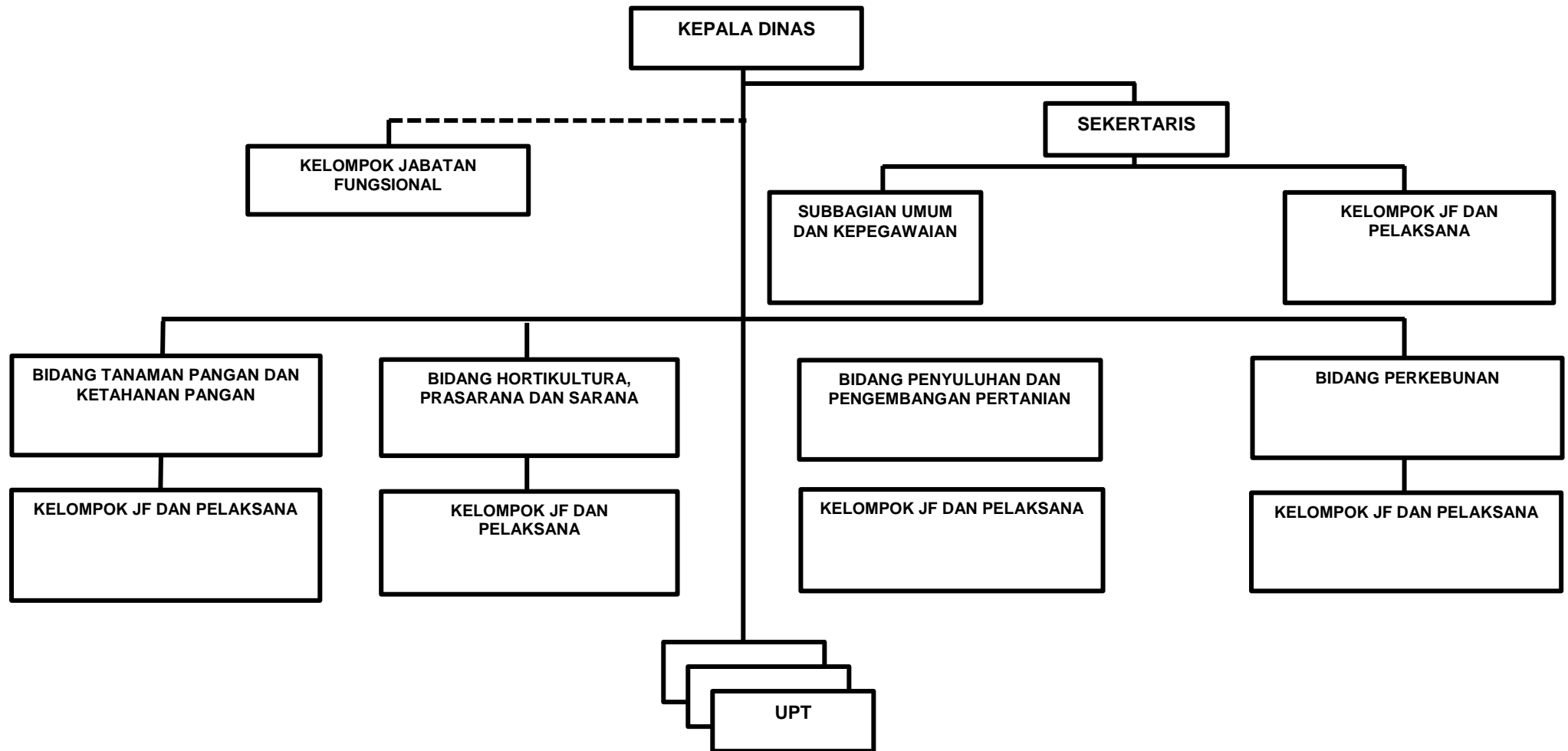
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Batu Bara melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan
4. Bidang Hortikultura, Prasarana dan Sarana
5. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian
6. Bidang Perkebunan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada gambar berikut :

Bagan 1.2.1 Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 RENCANA KERJA**

Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja disusun sebagai pedoman dalam menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan. Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 didasarkan pada Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023 yang memuat visi, misi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Pada Renja Tahun 2023 telah ditetapkan tujuan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan sektor perkebunan.
- b. Terwujudnya ketahanan pangan
- c. Terwujudnya reformasi birokrasi

dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian (sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)
- b. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan
- c. Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1.1 Target Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Perkebunan  
Kabupaten Batu Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA
1	Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian (sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (sub sektor tanaman pangan dan hortikultura )	PDRB Sektor Pertanian (Subsektor tanaman pangan dan hortikultura / PDRB Kab. Batu Bara x 100%
		Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (sub sektor perkebunan )	PDRB Sektor Pertanian (Subsektor perkebunan / PDRB Kab. Batu Bara x 100%
		Jumlah Produksi Tanaman Pangan Padi	Jumlah produksi tanaman pangan padi
		Jumlah Produksi Tanaman Pangan Jagung	Jumlah produksi tanaman pangan jagung
		Jumlah Produksi Hortikultura Cabai	Jumlah produksi tanaman hortikultura cabai
		Jumlah Produksi Hortikultura Bawang Merah	Jumlah produksi tanaman hortikultura bawang merah
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Kelapa	Jumlah produksi tanaman perkebunan kelapa
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit	Jumlah produksi tanaman perkebunan kelapa sawit
2	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor PPH kelompok padi-padian + umbi-umbian+ .....+ skor PPH kelompok lain
3	Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	

Untuk mendukung keberhasilan tujuan dan sasaran, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara telah menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang disajikan pada tabel berikut :



Tabel 2.1.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Indikator

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/ kegiatan (output)	Target
Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIVIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	Skor Pola Pangan Harapan	80 Angka 1-100
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Laporan penyediaan pangan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya	3 laporan
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	3 laporan
Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah	70,01 Nilai
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen/laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	14 Dokumen/laporan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan</b>	<b>4 Dokumen</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	147 Orang
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Laporan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 Laporan

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/ kegiatan (output)	Target
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi barang milik daerah</b>	<b>1 Laporan</b>
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	1 Laporan
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>4 Laporan</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakankeperluan kantor lainnya	20 Paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak yang disediakan	5 Paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2000 Dokumen
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	215 Laporan
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang tersedia</b>	<b>2 Unit</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 Unit
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>3 Laporan</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang dipelihara</b>	<b>95 Unit</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/ kegiatan (output)	Target
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	45 Unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	31 Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	0 Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	18 Unit
	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Jumlah Dokumen Penataan Organisasi</b>	<b>1 Dokumen</b>
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen
<b>Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian (sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Luas lahan baku terfasilitasi sarana pertanian</b>	<b>415 Ha</b>
	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana pertanian</b>	<b>14 Laporan</b>
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan
	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah laporan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan</b>	<b>1 Dokumen</b>
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/ kegiatan (output)	Target
		<b>Luas lahan baku terfasilitasi prasarana pertanian</b>	<b>400 Ha</b>
	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Jumlah kawasan perkebunan yang terfasilitasi perencanaan pengembangan berkelanjutan	1 Kawasan
	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>2 Laporan</b>
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Peta sebaran irigasi dan jalan usaha tani	1 Dokumen
	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan	1 Dokumen
	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>23 Unit</b>
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20 unit
	Pembangunan rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Luas lahan sawah yang terfasilitasi pengendalian pasca bencana alam</b>	<b>340 Ha</b>
	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten /Kota</b>	<b>1 Laporan</b>
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan	1 Laporan
	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>Jumlah lahan perkebunan rakyat yang memperoleh STDB</b>	<b>4000 Persil</b>

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/ kegiatan (output)	Target
	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Laporan pelaksanaan penerbitan izin usaha pertanian</b>	<b>1 Laporan</b>
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan
	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Jumlah PPL yang naik kelas jabatan</b>	<b>2 Orang</b>
	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kelembagaan pertanian</b>	<b>3 Laporan</b>
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Unit
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	46 Unit

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA

Sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Daerah dan Kepala OPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2.1 PK Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Batubara Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian (Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (sub sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Persen	4
		Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (sub sektor Perkebunan)	Persen	12
		Jumlah Produksi tanaman Pangan Padi	Ton	135.000
		Jumlah Produksi tanaman Pangan Jagung	Ton	2.000
		Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Cabe	Ton	16.000
		Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Bawang Merah	Ton	250
		Jumlah Produksi kelapa sawit	Ton	200.000
		Jumlah produksi Kelapa	Ton	60.000
2	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Angka 1-100	80
3	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (70,01)

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>	<b>KETERA- NGAN</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.191.421.276	APBD
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	56.000.0000	APBD
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.238.800.000	APBD
4	Program penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.142.248.000	APBD
5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	123.200.000	APBD
6	Program Perizinan Usaha Pertanian	158.845.000	
7	Program Penyuluhan Pertanian	876.750.000	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>23.787.264.276</b>	

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batubara Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Capaian kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1 Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Rasio (%)
Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian (Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (sub sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Persen	4	3,73	93,25
	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (sub sektor Perkebunan)	Persen	12	14,09	117,42
	Jumlah Produksi tanaman Pangan Padi	Ton	135.000	131.573,52	97,46
	Jumlah Produksi tanaman Pangan Jagung	Ton	2.000	821,08	41,05
	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Cabai	Ton	16.000	14.092,10	88,07
	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Bawang Merah	Ton	250	44,00	17,60
	Jumlah Produksi kelapa sawit	Ton	200.000	172.636	86,32
	Jumlah produksi Kelapa	Ton	60.000	52.050	86,75
Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Angka 1-100	80	87,27	109,08
Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (70,01)	B (69,56)	99,36



Dari tabel tersebut dapat dilihat capaian dari tiap-tiap Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (sub sektor tanaman pangan dan hortikultura) sebesar 3,73% dari target sebesar 4% atau tercapai 93,25% dan persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (sub sektor tanaman perkebunan) sebesar 14,09% dari target sebesar 12% atau mencapai 117,42%. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (subsektor tanaman pangan dan hortikultura) tidak mencapai target karena harga produk komoditas pangan dan hortikultura pada Tahun 2023 cenderung stabil dan produksi menurun dibandingkan tahun lalu, sedangkan produksi tanaman perkebunan cenderung stabil dibanding tahun lalu dengan harga produk komoditas perkebunan yaitu kelapa sawit mengalami kenaikan yang pesat sehingga persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB subsektor tanaman perkebunan meningkat dan menekan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sub sektor tanaman pangan dan hortikultura.
2. Produksi padi sebesar 131.573,52 ton dari target sebesar 135.000 ton atau mencapai 97,46%. Produksi padi tidak mencapai target karena masa tanam padi yang terlambat yang disebabkan tidak terpenuhi kebutuhan air untuk pertanaman. Namun produktivitas padi sawah dengan luas panen 23.549,94 Ha mencapai 55,87 kw/Ha. Produktivitas tersebut lebih tinggi dari pada produktivitas padi sawah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 yang hanya sebesar 51,44 kw/Ha. Keberhasilan peningkatan produktivitas ini didukung oleh peningkatan sarana irigasi, peningkatan sarana jalan produksi, penggunaan benih bersertifikat, penggunaan pupuk dan pestisida secara tepat, bantuan benih padi bagi lahan terdampak bencana banjir, bantuan alsintan, bantuan pengolahan lahan sawah petani dan tak terlepas dari kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan yang menyampaikan informasi dan teknologi kepada petani.
3. Produksi jagung yang hanya sebesar 821,08 ton dari target sebesar 2.000 ton atau 41,05%. Produksi tersebut tidak mencapai target karena petani tidak bertanam jagung, petani bertanam jagung bergantung pada bantuan yang diberikan yang tahun-tahun

sebelumnya difasilitasi oleh APBN, tetapi pada Tahun 2023 Kabupaten Batu Bara tidak mendapat alokasi bantuan pengelolaan budidaya jagung.

4. Produksi cabe merah sebesar 14.092,10 ton dari target sebesar 16.000 ton atau mencapai 88,07%. Produksi cabai merah tidak mencapai target dikarenakan terlambatnya masa tanam yang disebabkan ketaktersediaan sarana pengairan
5. Produksi bawang merah yang hanya terealisasi sebesar 44,00 ton dari target sebesar 250 ton atau 17,60%, Produksi tersebut jauh dibawah target karena sebagian besar petani tidak bertanam bawang merah, petani bertanam bawang merah bergantung pada bantuan yang diberikan yang tahun-tahun sebelumnya difasilitasi oleh APBN, tetapi pada Tahun 2023 Kabupaten Batu Bara tidak mendapat alokasi bantuan pengelolaan budidaya bawang merah, selain itu petani yang memang secara konsisten membudidayakan bawang merah belum menemukan varietas yang tepat untuk kondisi alam Kabupaten Batu Bara sehingga produk yang dihasilkan berumbi kecil kecil
6. Produksi kelapa sawit sebesar 172.636 ton dari target sebesar 200.000 ton atau mencapai 83,32%, produksi kelapa sawit belum maksimal diakibatkan adanya *replanting*
7. Produksi kelapa sebesar 52.050 ton dari target sebesar 60.000 ton atau mencapai 86,75%, produksi kelapa belum maksimal yang disebabkan terjadinya serangan hama Artona yang merusak buah dan batang kelapa dan terdapat *replanting* seluas 100 Ha
8. Skor Pola Pangan Harapan sebesar 87,27 dari target sebesar 80 atau mencapai 109,08%. Keberhasilan kinerja ini didukung oleh penyediaan RMU dan rumahnya, penyediaanya bed dryer dan rumahnya, sidak pasar pada hari besar sebagai upaya pengendalian harga pangan, dan kegiatan dukungan bagi PKK dengan menyediakan bibit tanaman sayuran dan tanaman buah-buahan yang dapat ditanam pada pekarangan. Namun jika dibandingkan dengan capaian Skor Pola Pangan Harapan tingkat nasional Tahun 2023 yakni sebesar 94,10 terlihat bahwa Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Batu Bara lebih rendah, hal ini disebabkan oleh

kecenderungan masyarakat yang kurang mengkonsumsi kacang-kacangan dan umbi-umbian.

9. Nilai AKIP Perangkat Daerah yaitu B (69,56) dari target BB (70,01) atau tercapai 99,36%. Nilai AKIP Perangkat Daerah belum dapat mencapai target BB, namun nilai capaiannya cukup baik, hal ini dikarenakan telah dilakukan pembenahan pada sejumlah dokumen perencanaan maupun pelaporan.

Pengukuran capaian kinerja juga dilakukan pada pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang telah dianggarkan, adapun capaian kinerja berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Outcome)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIVIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	Skor Pola Pangan Harapan	80 Angka 1-100	n/a Angka 1-100	n/a
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Laporan penyediaan pangan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya	3 laporan	3 laporan	100,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	3 laporan	3 laporan	100,00
Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah	70,01 Nilai	69,59 Nilai	99,40
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	14 Dokumen/laporan	14 Dokumen/laporan	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Outcome)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	9 Laporan	100,00
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>100,00</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	147 Orang	147 Orang	100,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1 Laporan	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 Laporan	1 Laporan	100,00
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi barang milik daerah</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>100,00</b>
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	1 Laporan	1 Laporan	100,00

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Outcome)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>100,00</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakankeperluan kantor lainnya	20 Paket	20 Paket	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan yang disediakan	5 Paket	5 Paket	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2000 Dokumen	2000 Dokumen	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	215 Laporan	215 Laporan	100,00
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang tersedia</b>	<b>2 Unit</b>	<b>2 Unit</b>	<b>100,00</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 Unit	1 Unit	100,00

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Outcome)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	1 Unit	100,00
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>100,00</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang dipelihara</b>	<b>95 Unit</b>	<b>95 Unit</b>	<b>100,00</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	100,00

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Outcome)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	45 Unit	45 Unit	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	31 Unit	31 Unit	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	18 Unit	18 Unit	100,00
	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Jumlah Dokumen Penataan Organisasi</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>100,00</b>
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Outcome)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian (sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Luas lahan baku terfasilitasi sarana pertanian	415 Ha	415 Ha	100,00
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana pertanian	14 Laporan	14 Laporan	100,00
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan	2 Laporan	100,00
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	12 Laporan	100,00
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Outcome)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Luas lahan baku terfasilitasi prasarana pertanian	400 Ha	400 Ha	100,00
		Jumlah kawasan perkebunan yang terfasilitasi perencanaan pengembangan berkelanjutan	1 Kawasan	0 Kawasan	-
	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>50,00</b>
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Peta sebaran irigasi dan jalan usaha tani	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan	1 Dokumen		-
	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>23 Unit</b>	<b>23 Unit</b>	<b>100,00</b>
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20 unit	20 unit	100,00

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Outcome)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
	Pembangunan rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	3 Unit	100,00
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Luas lahan sawah yang terfasilitasi pengendalian pasca bencana alam</b>	<b>340 Ha</b>	<b>340 Ha</b>	<b>100,00</b>
	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten /Kota</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>100,00</b>
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan	1 Laporan	1 Laporan	100,00
	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>Jumlah lahan perkebunan rakyat yang memperoleh STDB</b>	<b>4000 Persil</b>	<b>0 Persil</b>	<b>-</b>
	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Laporan pelaksanaan penerbitan izin usaha pertanian</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>0 Laporan</b>	<b>-</b>
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	0 Laporan	-

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Outcome)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Jumlah PPL yang naik kelas jabatan	2 Orang	1 Orang	50,00
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kelembagaan pertanian	3 Laporan	3 Laporan	100,00
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Unit	7 Unit	100,00
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1 Unit	100,00
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	46 Unit	46 Unit	100,00
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>99,50</b>

Capaian kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga terlihat baik, dengan capaian sebesar 99,50%

Namun beberapa subkegiatan tidak tercapai maksimal yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :

1. Pada Subkegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana Kawasan dan Komoditas Perkebunan, realisasi output kegiatan 0% diakibatkan oleh Dana Bagi Hasil (DBH) yang turun di Kabupaten Batu Bara pada pertengahan Desember 2023 sehingga kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan.
2. Pada Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian, realisasi jumlah izin usaha yang dibina dan diawasi 0% diakibatkan oleh Dana Bagi Hasil (DBH) yang turun di Kabupaten Batu Bara pada pertengahan Desember 2023 sehingga kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan.
3. Pada Program Penyuluhan Pertanian, indikator program sebesar 50% diakibatkan oleh kenaikan kelas jabatan PPL ditentukan oleh uji kompetensi dan hanya 1 PPL yang lulus dalam uji kompetensi tersebut.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batubara Tahun 2023 juga dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 serta membandingkan capaian kinerja terhadap target jangka menengah yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023 dan secara ringkas disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2023			2022		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian (Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (sub sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Persen	4	3,73	93,25	4	3.61	90,25
		Persentase kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB (sub sektor Perkebunan)	Persen	12	14,09	117,42	12	13.38	111,50
		Jumlah Produksi tanaman Pangan Padi	Ton	135.000	131.573,52	97,46	135.000	157.472,84	116,65
		Jumlah Produksi tanaman Pangan Jagung	Ton	2.000	821,08	41,05	2.000	3.688,33	184,42
		Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Cabe	Ton	16.000	14.092,10	88,07	16.000	16.271,23	101,70
		Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Bawang Merah	Ton	250	44,00	17,60	250	102.52	41,01
		Jumlah Produksi kelapa sawit	Ton	200.000	172.636	86,32	200.000	172.636	86,32
		Jumlah produksi Kelapa	Ton	60.000	52.050	86,75	60.000	52.131	86,89
2	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Angka 1-100	80	87,27	109,08	80	84,80	106,00
3	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (70,01)	B (69,56)	99,36	BB(70,01)	B (61,59)	85,54

Tabel 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Renstra Tahun 2019-2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2023				Target pda Akhir Tahun Renstra	Capaian (%)
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian (Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (sub sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Persen	4	3,73	93,25	4	93,25
		Persentase kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB (sub sektor Perkebunan)	Persen	12	14,09	117,42	12	117,42
		Jumlah Produksi tanaman Pangan Padi	Ton	135.000	131.573,52	97,46	135.000	97,46
		Jumlah Produksi tanaman Pangan Jagung	Ton	2.000	821,08	41,05	2.000	41,05
		Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Cabe	Ton	16.000	14.092,10	88,07	16.000	88,07
		Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Bawang Merah	Ton	250	44,00	17,60	250	17,60
		Jumlah Produksi kelapa sawit	Ton	200.000	172.636	86,32	200.000	86,32
		Jumlah produksi Kelapa	Ton	60.000	52.050	86,75	60.000	86,75
2	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Angka 1-100	80	87,27	109,08	80	109,08
3	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (70,01)	B (69,56)	99,36	BB(70,01)	99,36

- Produksi padi pada Tahun 2023 terlihat baik yang ditunjukkan dengan angka capaian 97,46% terhadap target, namun dibandingkan dengan Tahun 2022 produksi padi menurun sebesar 25.899,32 ton yang disebabkan oleh luas lahan sawah yang berkurang akibat alih fungsi lahan pertanian.
- Produksi jagung pada Tahun 2023 menurun sebesar 2.867,25 ton dari produksi Tahun 2022 karena bertanam jagung bergantung pada bantuan yang diberikan yang tahun-tahun sebelumnya difasilitasi oleh APBN, sedangkan pada Tahun 2023 Kabupaten Batu Bara tidak mendapat alokasi bantuan pengelolaan budidaya jagung.
- Produksi cabe menurun sebesar 2.179,13 ton dibandingkan dengan produksi di tahun 2022. Penurunan angka produksi ini diakibatkan oleh terlambatnya masa tanam akibat ketaktersediaan sarana pengairan
- Produksi bawang merah menurun sebesar 58,52 ton jika dibandingkan dengan produksi Tahun 2022, penurunan produksi bawang merah diakibatkan petani tidak bertanam bawang merah. Petani bertanam bawang merah bergantung pada bantuan yang diberikan yang tahun-tahun sebelumnya difasilitasi oleh APBN, sedangkan pada Tahun 2023 Kabupaten Batu Bara tidak mendapat alokasi bantuan pengelolaan budidaya bawang merah. Selain itu petani yang memang secara konsisten membudidayakan bawang merah belum menemukan varietas yang tepat untuk kondisi alam Kabupaten Batu Bara sehingga produk yang dihasilkan berumbi kecil kecil
- Produksi kelapa sawit tetap jika dibandingkan dengan produksi kelapa sawit Tahun 2022 akibat adanya replanting tanaman kelapa sawit.
- Produksi kelapa menurun sebesar 81 ton dibandingkan dengan produksi Tahun 2022 yang produksi kelapa belum maksimal yang disebabkan terjadinya serangan hama Artona yang merusak buah dan batang kelapa dan terdapat *replanting* seluas 100 Ha



### **3.2 REALISASI ANGGARAN**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2023 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 23.787.264.276,00 yang tertampung pada Perubahan APBD Tahun 2023 Kabupaten Batu Bara. Adapun realisasi anggaran tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2.1 Realisasi Anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Outcome)	Target		Realisasi		%	
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIVIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	80	56.000.000	87,27	55.283.326	109,08	98,72
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Laporan penyediaan pangan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya	3 laporan	56.000.000	3 laporan	55.283.326	100	98,72
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	3 laporan	56.000.000	3 laporan	55.283.326	100	98,72
Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah	70,01 Nilai	14.191.421.276	69,56 Nilai	13.887.929.949	99,36	97,86
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	14 Dokumen/laporan	22.534.960	14 Dokumen/laporan	22.464.000	100	99,69
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	11.604.960	5 Dokumen	11.564.000	100	99,65

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Outcome)	Target		Realisasi		%	
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	10.930.000	9 Laporan	10.900.000	100	99,73
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>11.171.774.039</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>10.940.970.332</b>	<b>100</b>	<b>97,93</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	147 Orang	11.106.274.039	147 Orang	10.877.930.332	100	97,94
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Laporan	55.400.000	12 Laporan	53.400.000	100	96,39
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	5.600.000	1 Laporan	5.140.000	100	91,79
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 Laporan	4.500.000	1 Laporan	4.500.000	100	100,00
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi barang milik daerah</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>16.000.000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>15.600.000</b>	<b>100</b>	<b>97,50</b>
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	1 Laporan	16.000.000	1 Laporan	15.600.000	100	97,50

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Outcome)	Target		Realisasi		%	
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>319.666.877</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>309.899.516</b>	<b>100</b>	<b>96,94</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan keperluan kantor lainnya	20 Paket	90.528.954	20 Paket	85.339.199	100	94,27
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan yang disediakan	5 Paket	14.937.923	5 Paket	13.980.500	100	93,59
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2000 Dokumen	12.000.000	2000 Dokumen	12.000.000	100	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	215 Laporan	202.200.000	215 Laporan	198.579.817	100	98,21
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang tersedia</b>	<b>2 Unit</b>	<b>1.550.000.000</b>	<b>2 Unit</b>	<b>1.520.702.445</b>	<b>100</b>	<b>98,11</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 Unit	550.000.000	1 Unit	532.590.900	100	96,83
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	988.111.545	100	98,81

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Outcome)	Target		Realisasi		%	
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>786.440.000</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>767.695.520</b>	<b>100</b>	<b>97,62</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	100	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	140.320.000	12 Laporan	135.722.094	100	96,72
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	641.120.000	12 Laporan	626.973.426	100	97,79
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang dipelihara</b>	<b>95 Unit</b>	<b>257.005.400</b>	<b>95 Unit</b>	<b>243.656.136</b>	<b>100</b>	<b>94,81</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	70.895.000	1 Unit	69.510.000	100	98,05
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	45 Unit	145.300.400	45 Unit	133.791.287	100	92,08

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Outcome)	Target		Realisasi		%	
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	31 Unit	21.830.000	31 Unit	21.631.000	100	99,09
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0 Unit	8.000.000	0 Unit	7.997.550	0	99,97
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	18 Unit	10.980.000	18 Unit	10.726.299	100	97,69
	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Jumlah Dokumen Penataan Organisasi</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>68.000.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>66.942.000</b>	<b>100</b>	<b>98,44</b>
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	68.000.000	1 Dokumen	66.942.000	100	98,44
<b>Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian (sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Luas lahan baku terfasilitasi sarana pertanian</b>	<b>415 Ha</b>	<b>3.238.800.000</b>	<b>415 Ha</b>	<b>3.228.395.850</b>	<b>100</b>	<b>99,68</b>

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Outcome)	Target		Realisasi		%	
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana pertanian</b>	<b>14 Laporan</b>	<b>3.137.750.000</b>	<b>14 Laporan</b>	<b>3.127.581.850</b>	<b>100</b>	<b>99,68</b>
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan	2.465.450.000	2 Laporan	2.462.065.900	100	99,86
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	672.300.000	12 Laporan	665.515.950	100	98,99
	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah laporan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>101.050.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>100.814.000</b>	<b>100</b>	<b>99,77</b>
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	101.050.000	1 Dokumen	100.814.000	100	99,77

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Outcome)	Target		Realisasi		%	
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Luas lahan baku terfasilitasi prasarana pertanian	400 Ha	5.142.248.000	400 Ha	4.908.541.441	100	95,46
		Jumlah kawasan perkebunan yang terfasilitasi perencanaan pengembangan berkelanjutan	1 Kawasan		0 Kawasan		0	0,00
	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	2 Laporan	402.608.000	1 Laporan	169.134.591	50	42,01
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Peta sebaran irigasi dan jalan usaha tani	1 Dokumen	170.493.000	1 Dokumen	169.134.591	100	99,20
	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan	1 Dokumen	232.115.000		0	0	0,00



Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Outcome)	Target		Realisasi		%	
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>23 Unit</b>	<b>4.739.640.000</b>	<b>23 Unit</b>	<b>4.739.406.850</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20 unit	4.095.000.000	20 unit	4.094.766.850	100	99,99
	Pembangunan rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	644.640.000	3 Unit	644.640.000	100	100,00
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Luas lahan sawah yang terfasilitasi pengendalian pasca bencana alam</b>	<b>340 Ha</b>	<b>123.200.000</b>	<b>340 Ha</b>	<b>121.500.000</b>	<b>100</b>	<b>98,62</b>
	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten /Kota</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>123.200.000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>121.500.000</b>	<b>100</b>	<b>98,62</b>
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan	1 Laporan	123.200.000	1 Laporan	121.500.000	100	98,62

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Outcome)	Target		Realisasi		%	
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>Jumlah lahan perkebunan rakyat yang memperoleh STDB</b>	<b>4000 Persil</b>	<b>158.845.000</b>	<b>0 Persil</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Laporan pelaksanaan penerbitan izin usaha pertanian</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>158.845.000</b>	<b>0 Laporan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Pembinaan dan Pengasawan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	158.845.000	0 Laporan	0	0	0,00
	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Jumlah PPL yang naik kelas jabatan</b>	<b>2 Orang</b>	<b>876.750.000</b>	<b>1 Orang</b>	<b>810.960.000</b>	<b>50</b>	<b>92,50</b>
	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kelembagaan pertanian</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>876.750.000</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>810.960.000</b>	<b>100</b>	<b>92,50</b>
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Unit	378.000.000	7 Unit	312.500.000	100	82,67

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Outcome)	Target		Realisasi		%	
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	78.750.000	1 Unit	78.710.000	100	99,95
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	46 Unit	420.000.000	46 Unit	419.750.000	100	99,94
<b>Jumlah</b>				<b>23.787.264.276</b>		<b>23.012.610.566</b>	<b>99,50</b>	<b>96,74</b>

Dari tabel tersebut diketahui bahwa realisasi anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun 2023 mencapai 96,74% dengan capaian kinerja berdasarkan program kegiatan dan sub kegiatannya sebesar 99,50%.

Adapun penyebab realisasi anggaran dan kinerja tidak maksimal dan paling rendah capaian disebabkan oleh :

1. Pada Subkegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana Kawasan dan Komoditas Perkebunan, realisasi output kegiatan 0% diakibatkan oleh Dana Bagi Hasil (DBH) yang turun di Kabupaten Batu Bara pada pertengahan Desember 2023 sehingga kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan.
2. Pada Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian, realisasi jumlah izin usaha yang dibina dan diawasi 0% diakibatkan oleh Dana Bagi Hasil (DBH) yang turun di Kabupaten Batu Bara pada pertengahan Desember 2023 sehingga kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan.
3. Pada Program Penyuluhan Pertanian, indikator program sebesar 50% diakibatkan oleh kenaikan kelas jabatan PPL ditentukan oleh uji kompetensi dan hanya 1 PPL yang lulus dalam uji kompetensi tersebut.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengantisipasi kelemahan-kelemahan dalam pencapaian target kinerja di tahun yang akan datang, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara akan melakukan upaya sebagai berikut :

- a. Perencanaan yang lebih matang
- b. Koordinasi antara perencana dan pelaksana kegiatan dan setiap pihak terkait.

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dari sumber dana APBD baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dioptimalkan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Semoga apa yang tertuang pada Laporan Kinerja ini dapat menjadi tolak ukur kebijakan Pembangunan Pertanian di tahun yang akan datang dan dapat mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan kinerja menuju pencapaian pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Batu Bara, 31 Januari 2024

**Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan  
Kabupaten Batu Bara**



**Ir. Susilistiawati Ritonga, M.Si**

Pembina Tk.I

NIP. 19680228 199303 2 002